

Evaluasi Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Rinjani Perkasa di Deswita Non Pendakian Savana Propok Resort Aikmel Taman Nasional Gunung Rinjani

¹*Nila Kusuma, ²Hairil Anwar, ³Dwi Sukma Rini

¹²³ Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: hairil_a@unram.ac.id

Received: October 2025; Revised: Desember 2025; Published: Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kelembagaan ekowisata berbasis masyarakat di Deswita Non Pendakian Savana Propok Resort Aikmel, Taman Nasional Gunung Rinjani, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah *Institutional Development Framework* (IDF) untuk menilai tingkat efektivitas kelembagaan melalui lima dimensi utama, yaitu ekologi, ekonomi, sosial budaya, tata kelola, dan pengalaman wisatawan. Selain itu, analisis SWOT diterapkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan ekowisata sebagai dasar perumusan strategi penguatan. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan tiga kelompok responden utama, yaitu pihak pemerintah, pengelola lokal, dan wisatawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai indeks IDF gabungan sebesar 1,6, yang menempatkan kelembagaan pada kategori “berkembang”. Pemerintah dan pengelola menilai kelembagaan telah menunjukkan arah menuju tahap pematangan, sementara wisatawan menilai masih terdapat kekurangan terutama pada aspek fasilitas dan pelayanan wisata. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi prioritas diarahkan pada peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan jaringan kemitraan eksternal, dan optimalisasi promosi digital berbasis komunitas. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam memperkuat kelembagaan ekowisata agar mampu berkembang secara adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui triangulasi antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data. Temuan penelitian memberikan implikasi praktis bagi pengelola dan pemerintah dalam memperkuat koordinasi kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperluas jejaring kemitraan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan cakupan lokasi yang relatif terbatas, sehingga disarankan adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk memperkuat hasil evaluasi kelembagaan.

Kata kunci: Bukit Kondo, Ekowisata Berbasis Masyarakat, IDF, Kelembagaan, SWOT.

How to Cite: Kusuma, N., Anwar, H., & Rini, G. S. (2025). Evaluasi Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Rinjani Perkasa di Deswita Non Pendakian Savana Propok Resort Aikmel Taman Nasional Gunung Rinjani. *Journal of Authentic Research*, 4(2), 2237–2256. <https://doi.org/10.36312/tryc9z93>



<https://doi.org/10.36312/tryc9z93>

Copyright© 2025, Kusuma et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam di daratan dan di lautan dengan keberagaman biodiversitas beserta ekosistemnya. Kondisi ini menyebabkan Indonesia berpeluang mengembangkan bidang pariwisata sebagai salah satu sektor perekonomian unggul dalam mewujudkan kedaulatan negara di kancah internasional. Oleh karena itu perkembangan pariwisata yang pesat di seluruh

wilayah Indonesia akan memberikan manfaat yang besar kepada beberapa pihak yakni pemerintah, swasta bahkan masyarakat (Azmi *et al.*, 2025).

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia. Pesona keindahan terhadap ragam bentala NTB serta budaya yang dimilikinya, memberikan kekuatan tersendiri untuk datang dan mengunjungi NTB baik secara singkat ataupun lama. Oleh karena itu infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan untuk tinggal dalam jangka waktu yang singkat ataupun lama perlu dinaikkan tingkatnya sehingga wisatawan yang berkunjung merasa nyaman. Selain itu pengembangan infrastruktur pariwisata juga menjadi salah satu wadah untuk memberikan lapangan pekerjaan baru dan menjadikan sumber pendapatan bagi masyarakat meningkat di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Salah satu wilayah NTB yang dikenal dengan keindahan alamnya adalah Pulau Lombok. Lombok menyediakan beragam pilihan wisata, mulai dari pantai-pantai eksotis, aktivitas petualangan seperti pendakian, hingga eksplorasi budaya dan tradisi lokal, termasuk desa adat Sasak serta kerajinan tangan khas daerah. Pulau Lombok memiliki keterkaitan yang kuat dengan Gunung Rinjani. Keberadaan Gunung Rinjani, yang merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia sekaligus salah satu destinasi wisata alam terkemuka di negara ini (Azhari *et al.*, 2024).

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki luas sekitar 41.330 hektar dan ditetapkan sebagai taman nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/Kpts-II/1997. Secara administratif, wilayah TNGR mencakup sebagian Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Kawasan ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta bentang alam yang memadukan hutan pegunungan, savana, dan kaldera Rinjani yang ikonik. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, TNGR juga menjadi pusat kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan, dan wisata alam. Dalam pengelolaannya, Balai TNGR berupaya menyeimbangkan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di berbagai resort, salah satunya di Resort Aikmel yang menaungi kawasan Savana Propok dan Bukit Kondo. Pengelolaan berbasis kolaboratif ini diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan. Bukit Kondo Terletak di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Bukit Kondo menawarkan panorama perbukitan, udara sejuk, serta kekayaan flora dan fauna khas daerah tersebut. Data kunjungan menunjukkan bahwa setiap tahunnya Bukit Kondo menerima sekitar 25.000 wisatawan, mencerminkan tingginya minat kunjungan sekaligus besarnya potensi ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pengelolaan wisata pendakian khususnya pada bukit-bukit tersebut berbasis masyarakat. Dimana masyarakat yang berperan aktif dalam perencanaan sampai dengan pengelolaan. Pengelolaan ekowisata adalah elemen penting dalam perencanaan yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan jangka panjang dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan ekowisata juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan, mengingat bahwa ekowisata akan menjadi bagian penting dari kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keberlanjutan ini meliputi kemajuan teknologi dan pertumbuhan populasi (Jaelani *et al.*, 2023).

Dalam Wisang & Monika, 2025, 2025 Ekowisata berbasis masyarakat (community-based ecotourism/CBET) merupakan strategi pengelolaan pariwisata yang menekankan pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Konsep ini telah banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kawasan Lombok Timur. Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan penguatan kelembagaan lokal yang efektif dan berkelanjutan (Anggriani *et al.*, 2023). Sedangkan menurut (Kampung *et al.*, 2019) Ekowisata berbasis masyarakat adalah model pengembangan ekowisata yang memungkinkan dan mendukung keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata serta distribusi keuntungan yang diperoleh. Model ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal dan membantu mengurangi kemiskinan, di mana pendapatan dari ekowisata diperoleh melalui layanan perjalanan wisata, biaya pemandu, transportasi, homestay, dan penjualan souvenir.

Dengan demikian, meskipun konsep ekowisata berbasis masyarakat menawarkan peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan lokal dan pelestarian lingkungan, implementasinya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan memiliki peran penting dalam memastikan partisipasi masyarakat berjalan efektif, pembagian manfaat dilakukan secara adil, serta konflik kepentingan dapat diminimalisasi. Dikutip dari Dwi & Maskuri, 2023, kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas aturan-aturan yang mengatur sekelompok individu dalam suatu komunitas. Sistem ini mencakup berbagai aspek, seperti pola perilaku, alat, perlengkapan, serta norma yang telah disepakati sebagai nilai bersama pada suatu waktu tertentu. Tujuan utama dari kelembagaan adalah untuk melayani kepentingan bersama dalam kelompok masyarakat tersebut. Selain itu, aturan yang ada berfungsi sebagai sarana koordinasi guna memastikan keteraturan dan efektivitas dalam interaksi serta kegiatan yang dilakukan oleh anggota komunitas.

Kelembagaan berbasis masyarakat dalam ekowisata juga mampu menciptakan aksi kolektif yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Misalnya, masyarakat dapat membentuk koperasi wisata, kelompok sadar wisata, atau unit usaha berbasis desa yang mengelola homestay, pemandu lokal, dan produk-produk UMKM ramah lingkungan. Melalui pelatihan dan pendampingan, kapasitas warga untuk mengelola usaha, memahami manajemen risiko, serta membangun jaringan pemasaran dapat ditingkatkan (Susanto *et al.*, 2022). Di sisi lain, struktur kelembagaan seperti ini memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan, serta memperkuat sumber daya non-material seperti kepercayaan, solidaritas, dan pengetahuan lokal yang menjadi pondasi pembangunan jangka panjang. Dalam hal ini, dukungan pemerintah dan mitra akademik sangat diperlukan, bukan sebagai pengendali, melainkan sebagai fasilitator dan pendamping proses pemberdayaan (Purwendah *et al.*, 2022).

Kelembagaan berbasis masyarakat bukan hanya berfungsi sebagai wadah pengelolaan usaha wisata, tetapi juga menjadi sarana membangun solidaritas, kepercayaan, serta kapasitas lokal dalam menjaga keberlanjutan ekowisata. Agar kelembagaan ini berjalan efektif, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap proses pengelolaan yang berlangsung di lapangan. Evaluasi pengelolaan ekowisata merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan ekowisata sejalan

dengan prinsip dan tujuan keberlanjutan. Evaluasi dalam ekowisata perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan, serta indikator yang relevan dengan kondisi spesifik wilayah yang dikelola (Nazwin & Hidayat, 2022). Sementara itu, studi oleh Sadikin *et al.*, (2020) di Taman Nasional Gunung Rinjani menggunakan metode Multidimensional Scaling (MDS) untuk menilai efektivitas pengelolaan ekowisata. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata di lokasi tersebut belum efektif, dengan kendala utama pada keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan mencakup sistem perlindungan lingkungan dan kolaborasi antar lembaga yang terlibat.

Evaluasi terhadap kelembagaan dalam pengelolaan ekowisata menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu dimensi utama dalam evaluasi ekowisata adalah aspek kelembagaan, yang mencakup partisipasi lokal, koordinasi antar sektor, serta peran dan kewajiban hukum dari pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata. Tanpa sistem kelembagaan yang kuat dan inklusif, pengelolaan ekowisata rentan terhadap konflik kepentingan serta penyimpangan dari tujuan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi juga perlu mencermati sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kawasan, karena hal ini berkorelasi langsung dengan keberlanjutan program serta penerimaan sosial terhadap praktik ekowisata (Nazwin & Hidayat, 2022).

Dengan pemahaman tersebut, jelas bahwa kelembagaan menjadi elemen fundamental dalam keberhasilan pengelolaan ekowisata. Namun, untuk mengetahui sejauh mana kelembagaan berfungsi secara efektif, dibutuhkan suatu kerangka analisis yang mampu menilai berbagai dimensinya secara komprehensif. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *Institutional Development Framework* (IDF). IDF merupakan pendekatan dalam menilai efektivitas kelembagaan dalam pengelolaan ekowisata, dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Evaluasi kinerja berbasis IDF mencakup lima komponen utama, yaitu ekologi, ekonomi, sosial budaya, tata kelola, serta pengalaman wisatawan. Komponen ekologi menilai keberlanjutan lingkungan dan konservasi, sementara aspek ekonomi berfokus pada manfaat finansial bagi masyarakat lokal. Dimensi sosial budaya mengukur keterlibatan serta dampak terhadap budaya setempat, sedangkan tata kelola menyoroti regulasi dan transparansi dalam pengelolaan ekowisata. Terakhir, pengalaman wisatawan mencerminkan kualitas layanan serta kepuasan pengunjung. Pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh untuk memastikan ekowisata berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak (Rojana & Muhsoni, 2021).

Berdasarkan penelitian Putri *et al.*, (2023) tentang “Strategi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Bukit Pergasingan Desa Sembalun Lombok Timur” yang bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Wisata Bukit Pergasingan, didapatkan hasil bahwa strategi yang digunakan pada pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Bukit Pergasingan adalah : (1) Mengoptimalkan daya tarik wisata bukit pergasingan dengan potensi yang dimiliki dengan mempertahankan keasliannya (2) Mengemas paket wisata yang lebih menarik dan lebih mengedukasi terkait konservasi kepada tamu, (3)

Mengoptimalkan kolaborasi dengan LSM, dinas pariwisata atau dinas terkait untuk pengembangan wisata Bukit Pergasingan.

Dikutip dari Sulfiantono *et al.*, (2015) tentang “Analisis komparatif kelembagaan kawasan konservasi Indonesia dan Tiongkok menggunakan Institutional Development Framework” yang bertujuan untuk membandingkan perkembangan kelembagaan pada dua kawasan, yaitu Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) di Indonesia dan Cagar Alam Beijing-Songshan di Tiongkok, dengan menggunakan Institutional Development Framework (IDF), didapatkan hasil bahwa pengelolaan kelembagaan di CA Songshan lebih berkembang dibandingkan dengan TNGM. Namun, kedua kawasan masih menghadapi tantangan yang sama, seperti kurangnya perhatian dari pemerintah pusat, keterbatasan pendanaan, minimnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia, serta adanya konflik kepentingan dengan pemangku kepentingan lokal. Meskipun telah mencapai tahap pengelolaan yang cukup baik, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kelembagaan melalui peningkatan dukungan kebijakan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan koordinasi dengan pihak eksternal agar pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kerangka analisis tersebut sangat relevan ketika diterapkan pada kasus Bukit Kondo, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kawasan ini memiliki daya tarik alam berupa panorama perbukitan, udara sejuk, serta potensi flora dan fauna khas daerah. Data kunjungan menunjukkan rata-rata 25.000 wisatawan setiap tahunnya, yang menandakan besarnya minat wisata dan potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Namun, di lapangan, pengelolaan kawasan ini masih menghadapi sejumlah kendala. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola utama kerap berhadapan dengan keterbatasan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, serta akses terhadap pendampingan teknis dan dukungan pemerintah. Selain itu, hubungan kelembagaan antara Pokdarwis dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) belum sepenuhnya sinkron. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam hal pungutan biaya masuk, pemeliharaan fasilitas wisata, hingga pengawasan aktivitas pengunjung yang berdampak pada kelestarian lingkungan.

Penelitian terdahulu (Putri *et al.*, 2023; Sulfiantono *et al.*, 2015) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Namun, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada kawasan pendakian seperti Bukit Pergasingan atau Taman Nasional Gunung Merapi. Belum banyak penelitian yang menyoroti efektivitas kelembagaan di kawasan non-pendakian seperti Bukit Kondo yang justru memiliki potensi besar dalam mendukung konservasi dan ekonomi lokal. Hal ini menjadi celah penelitian (*research gap*) yang mendasari studi ini. Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada hubungan antara faktor internal kelembagaan (struktur organisasi, sumber daya manusia, dan tata kelola) serta faktor eksternal (dukungan kebijakan, kemitraan, dan partisipasi wisatawan). Keduanya dievaluasi melalui pendekatan Institutional Development Framework (IDF), yang kemudian dipadukan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelembagaan ekowisata berbasis masyarakat di Bukit Kondo dengan menggunakan pendekatan IDF, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan kelembagaan, serta

merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kerja sama antara masyarakat lokal dan pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, serta mendorong terciptanya tata kelola wisata yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam kondisi kelembagaan ekowisata di Bukit Kondo, Desa Bebidas, Lombok Timur. Analisis dilakukan menggunakan kerangka *Institutional Development Framework* (IDF), yang memuat lima dimensi utama: ekologi, ekonomi, sosial budaya, tata kelola, dan pengalaman wisatawan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup tiga kelompok utama, yaitu pihak pemerintah (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan aparaturnya), masyarakat lokal yang terlibat dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) maupun warga sekitar, serta wisatawan yang mengunjungi Bukit Kondo. Data dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini dirancang dengan mengacu pada lima dimensi utama dalam *Institutional Development Framework* (IDF), yaitu ekologi, ekonomi, sosial budaya, tata kelola, dan pengalaman wisatawan. Masing-masing dimensi diterjemahkan ke dalam indikator yang lebih spesifik, kemudian dijadikan pedoman untuk menyusun pertanyaan wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi.

Prosedur Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, berdasarkan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan ekowisata. Responden terdiri dari 7 orang perwakilan pemerintah (5 dari TNGR dan 2 dari aparaturnya), 15 wisatawan, serta 15 anggota masyarakat/pengelola (Pokdarwis dan tokoh adat). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Reliabilitas dijaga melalui *member check* dengan mengonfirmasi hasil temuan kepada informan kunci.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *Institutional Development Framework* (IDF) untuk menilai perkembangan kelembagaan berdasarkan lima dimensi utama—ekologi, ekonomi, sosial budaya, tata kelola, dan pengalaman wisatawan—yang dikategorikan menjadi tahap awal, berkembang, mantap, dan dewasa. Dalam penilaian IDF, setiap indikator diberi *bobot* (1–4) untuk menunjukkan tingkat kepentingan dan *rating* (0,25–4,0) untuk menggambarkan tingkat perkembangan aktual. Nilai indeks IDF diperoleh dari rata-rata tertimbang seluruh komponen, dengan kategori perkembangan: awal (0–1), berkembang (1–2), mantap (2–3), dan dewasa (3–4). Selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Hasil analisis digunakan untuk menilai efektivitas

kelembagaan dan menyusun strategi pengelolaan yang berkelanjutan serta adaptif terhadap kondisi lokal.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan penelitian diukur melalui ketercapaian proses dan hasil penelitian. Dari sisi proses, penelitian dinilai berhasil apabila seluruh tahapan pengumpulan data terlaksana sesuai rencana, melibatkan seluruh pihak terkait, dan menghasilkan data yang valid melalui triangulasi observasi, wawancara, dan dokumen kelembagaan.

Dari sisi hasil, penelitian dianggap berhasil apabila tingkat perkembangan kelembagaan menunjukkan kategori minimal "berkembang" berdasarkan skoring IDF, serta tersusunnya strategi penguatan kelembagaan yang relevan dan dapat diterapkan oleh Pokdarwis Bukit Kondo bersama mitra pemerintah. Keberhasilan juga ditandai dengan meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan wisata.

Secara keseluruhan, penelitian dinyatakan berhasil apabila hasil analisis memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kelembagaan ekowisata berbasis masyarakat dan dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan kawasan wisata serupa di wilayah lain.

Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 2 analisis yaitu analisis perkembangan kelembagaan menggunakan penilaian *Institutional Development Framework* (IDF) kemudian dilanjutkan dengan menganalisis rumusan strategi menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengetahui Perkembangan Kelembagaan Menggunakan *Institutional Development Framework* (IDF)

Dalam pengisian matriks, setiap komponen akan diberikan nilai berupa "bobot" dan "tingkat perkembangan". Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam tabel 1, sementara ketentuan mengenai nilai bobot perkembangan kelembagaan dapat ditemukan pada tabel 2.

Tabel 1. Ketentuan Nilai Bobot

Tingkat Kepentingan	Prioritas	Nilai Bobot
Sangat Penting	Sangat vital : Menentukan hidup-mati organisasi	4
Penting	Tidak dapat diabaikan : memerlukan perhatian khusus	3
Cukup Penting	Tidak menjadi prioritas	2
Tidak Penting	Mungkin menjadi penting dalam jangka Panjang	1

Tabel 2. Penilaian Tingkat Perkembangan Kelembagaan

Tingkat perkembangan kelembagaan	Tahap Perkembangan	Nilai
Awal	Permulaan suatu organisasi	0,25, 0,50, 0,75, atau 1,0
Berkembang	Pertumbuhan organisasi	1,25, 1,50, 1,75, atau 2,0
Pemantapan	Perluasan dan konsolidasi	2,25, 2,50, 2,75, atau 3,0
Dewasa	Organisasi sudah stabil dan berkelanjutan	3,25, 3,50, 3,75, atau 4,0

Setelah menentukan nilai bobot dan tingkat perkembangan, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks IDF serta menentukan grafik sasaran prioritas. Digunakan rumus-rumus sebagai berikut:

1. Menghitung Skor untuk setiap komponen kunci

$$XY = X \times Y$$

Keterangan :

X = Bobot Komponen Kunci

Y = Tingkat Perkembangan Organisasi

XY = Skor dari masing-masing komponen kunci (dalam rentang 0,25 hingga 16)

2. Menghitung Total Skor dan Total Bobot

Total skor (Z)

$$Z = \sum XY$$

Total bobot (B)

$$B = \sum X$$

3. Menghitung Indeks IDF

$$I = Z/B$$

Keterangan :

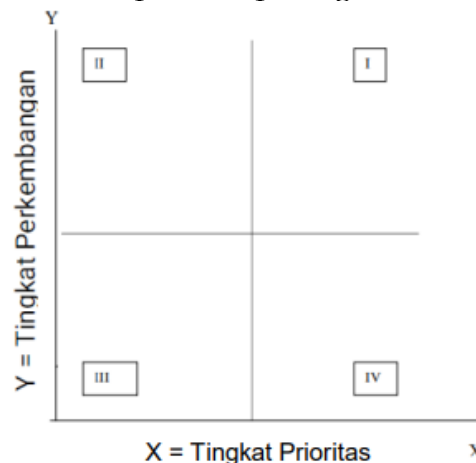
I = Indeks IDF (Maksimum 4,0)

Z = Total skor dari seluruh komponen kunci

B = Total bobot dari seluruh komponen kunci

4. Menentukan Grafik Sasaran Prioritas

Setiap komponen kunci dipetakan pada grafik berdasarkan koordinat :



Kuadran I berisi komponen penting namun masih kurang berkembang sehingga perlu menjadi prioritas penguatan. Kuadran II menunjukkan komponen yang sudah penting dan berkembang baik, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya. Kuadran III mencakup komponen yang berkembang tetapi kurang mendesak dan cukup diawasi secara berkala. Kuadran IV terdiri atas komponen dengan kepentingan dan perkembangan rendah yang penanganannya dapat ditunda atau dialihkan pada aspek yang lebih prioritas.

2. Mengetahui Strategi Pengelolaan Kelembagaan Menggunakan

Analisis strategi pengelolaan ekowisata berbasis Masyarakat dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Matrik SWOT pada digunakan untuk menganalisis fakto-faktor internal dan eksternal serta

mengklasifikasikannya menjadi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman kemudian dilakukan pembobotan.

Tabel 3. Matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

	IFAS	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
EFAS			
Peluang (<i>Opportunity</i>)		Strategi SO	Strategi WO
Ancaman (<i>Threat</i>)		Strategi ST	Sreategi WT

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kelembagaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Bukit Kondo

Analisis kelembagaan ekowisata berbasis masyarakat di Bukit Kondo menggunakan *Institutional Development Framework* (IDF) dilakukan terhadap tiga kelompok responden utama, yaitu pemerintah (TNGR dan pemerintah desa), pengelola (Pokdarwis), serta wisatawan. Setiap kelompok memberikan penilaian terhadap 23 komponen kelembagaan yang meliputi visi, misi, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, hubungan eksternal, hingga produk dan jasa wisata. Berdasarkan hasil perhitungan pada masing-masing komponen, diperoleh skor yang berbeda-beda sesuai penilaian responden. Untuk lebih jelasnya, rincian nilai bobot, tingkat perkembangan, serta skor tiap komponen kelembagaan ekowisata Bukit Kondo dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil skoring menggunakan IDF

Komp o-nen Kunci	Pemerintah		Pengelol a		Wisatawan		Skor (X x Y)		
	x	y	x	y	x	y	Pemerin tah	Pengelo la	Wisataw an
1	3,33	2	4	3,25	4	0	6,66	13	0
2	3,58	2,25	3	3,25	4	0	8,055	9,75	0
3	3,33	2,91	3	2,75	3	0	9,6903	8,25	0
4	2,66	2,25	3	2,5	3	0	5,985	7,5	0
5	2	1	3	2,5	3	0	2	7,5	0
6	3,25	1,91	4	2,25	4	0	6,2075	9	0
7	3	1,66	4	0,5	4	0	4,98	2	0
8	2,08	1,41	2	1,75	2	0	2,9328	3,5	0
9	3,41	2,5	3	3,5	4	0	8,525	10,5	0
10	2,66	1,66	4	1,25	3	1,5	4,4156	5	4,5
11	3,16	2,33	3	0,75	3	0,75	7,3628	2,25	2,25
12	3,33	2	4	1	4	0	6,66	4	0
13	3,66	3,66	4	3,75	4	4	13,3956	15	16
14	2	1	3	0	3	0	2	0	0
15	3,66	3,25	4	4	4	0	11,895	16	0
16	3,25	2,5	4	2	4	1	8,125	8	4

17	2,41	1,75	3	1,75	3	0	4,2175	5,25	0
18	1,25	0,91	2	0	2	0	1,1375	0	0
19	1,66	1,75	2	1,75	2	1	2,905	3,5	2
20	1,66	0,66	2	0	2	0	1,0956	0	0
21	3,5	2,75	4	2,5	4	0	9,625	10	0
22	3,5	2,33	4	3	4	2,25	8,155	12	9
23	2,41	1,41	3	0,75	3	2	3,3981	2,25	6
Tot.(B)	64,75		75		76	Tot.(Z)	139,4233	154,25	43,75

Berdasarkan hasil IDF, terdapat perbedaan persepsi antarresponden. Pemerintah menilai kelembagaan sudah menunjukkan arah pemantapan karena dukungan kebijakan dan kegiatan pelatihan sudah berjalan. Sementara itu, pengelola dan wisatawan menilai bahwa aspek pelayanan dan fasilitas masih kurang optimal. Salah satu anggota Pokdarwis menyatakan, "Kami sudah berusaha menata jalur dan fasilitas wisata, tetapi dukungan dari pihak luar belum maksimal." Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan lapangan.

Menghitung Indeks IDF masing-masing subjek :

1. Pemerintah

$$I = \frac{Z}{B}$$

$$I = \frac{139,4233}{64,75}$$

$$I = 2,1532$$

2. Pengelola

$$I = \frac{Z}{B}$$

$$I = \frac{154,25}{75}$$

$$I = 2,0566$$

3. Wisatawan

$$I = \frac{Z}{B}$$

$$I = \frac{43,75}{76}$$

$$I = 0,5756$$

Menghitung Indeks IDF Gabungan :

$$I = \frac{(\text{Indeks Pemerintah} + \text{Indeks Pengelola} + \text{Indeks Wisatawan})}{3}$$

$$I = \frac{(2,1532 + 2,0566 + 0,5756)}{3}$$

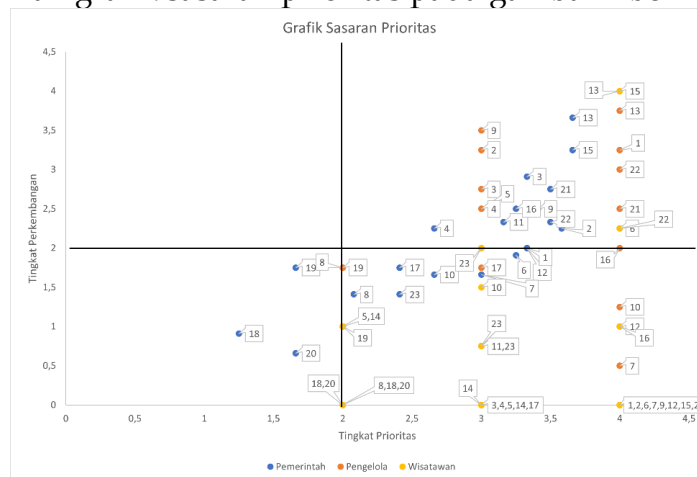
$$I = 1,5951$$

$$I = 1,6 \text{ (Berkembang)}$$

Hasil analisis IDF menunjukkan bahwa kelembagaan ekowisata Bukit Kondo berada pada tahap berkembang dengan nilai rata-rata 1,6; pemerintah mencatat skor 2,15, pengelola 2,05, dan wisatawan 0,57. Perbedaan ini menandakan kesenjangan persepsi, di mana pemerintah dan pengelola menilai kelembagaan sudah mulai mantap berkat struktur Pokdarwis dan partisipasi masyarakat, sedangkan wisatawan menilai masih lemah dalam pelayanan dan promosi (Putri *et al.*, 2023). Kekuatan utama terdapat pada pengembangan sumber daya manusia dan pelibatan tenaga lokal yang memperkuat identitas budaya (Lelloltery *et al.*, 2020), sedangkan kelemahan utama terletak pada pendanaan, kemitraan eksternal, dan promosi digital (Hanggraito & Sanjiwani, 2020). Secara keseluruhan, kelembagaan Bukit Kondo

menunjukkan potensi berkembang namun memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, akses pendanaan, serta strategi promosi dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan ekowisata lebih berkelanjutan (Nazwin & Hidayat, 2022).

Setelah dilakukan penilaian IDF terhadap 23 komponen kelembagaan, langkah berikutnya adalah memetakan hasil tersebut ke dalam grafik sasaran prioritas. Grafik ini berfungsi untuk menunjukkan posisi masing-masing komponen berdasarkan bobot kepentingan dan tingkat perkembangannya. Dengan visualisasi tersebut, dapat diketahui aspek kelembagaan mana yang sudah berjalan baik, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil grafik sasaran prioritas pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Grafik IDF Sasaran Prioritas

Berdasarkan Gambar 4.1, komponen kelembagaan tersebar ke dalam empat kuadran. Masing-masing kuadran menggambarkan kondisi yang berbeda, yaitu Kuadran I sebagai prioritas utama, Kuadran II sebagai aspek yang perlu dipertahankan, Kuadran III sebagai aspek yang cukup dimonitor, dan Kuadran IV sebagai aspek dengan prioritas relatif rendah. Analisis berikut menjelaskan posisi setiap komponen kelembagaan pada kuadran-kuadran tersebut serta dampak yang diberikan terhadap penguatan kelembagaan ekowisata berbasis masyarakat di Bukit Kondo.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kuadran I mencakup aspek-aspek yang sangat penting namun masih kurang berkembang, seperti pendanaan, kemitraan eksternal, promosi, dan pengelolaan limbah. Kondisi ini menandakan perlunya perhatian serius dari pengelola untuk memperkuat sumber pendanaan, membangun jaringan kerja sama dengan universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, serta mengoptimalkan promosi berbasis teknologi digital. Selain itu, sistem pengelolaan limbah juga perlu disusun secara lebih terarah agar mendukung keberlanjutan kawasan ekowisata. Kuadran ini menjadi prioritas utama dalam strategi penguatan kelembagaan.

Sementara itu, Kuadran II berisi komponen kelembagaan yang dinilai penting dan telah berkembang dengan baik, seperti visi, misi, budaya kerja, struktur organisasi, serta pelibatan masyarakat lokal yang menunjukkan fondasi kelembagaan yang cukup kuat. Strategi yang sesuai adalah menjaga kesinambungan dan memperkuat konsistensi pelaksanaannya melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan budaya partisipatif. Adapun Kuadran III berisi aspek yang telah berjalan baik tetapi kurang mendesak, seperti tugas, wewenang, dan evaluasi, yang cukup

dimonitor secara rutin. Kuadran IV mencakup komponen dengan kepentingan dan perkembangan rendah, seperti perencanaan dan evaluasi, yang meskipun belum menjadi prioritas tetap perlu diperhatikan secara bertahap guna mendukung keberlanjutan kelembagaan jangka panjang.

Dari empat kuadran diatas dapat dilihat bahwa kelembagaan ekowisata Bukit Kondo memiliki kekuatan utama pada aspek internal, khususnya dalam hal visi, misi, struktur organisasi, serta keterlibatan masyarakat lokal. Namun, kelembagaan masih lemah dalam hal akses pendanaan, promosi, jejaring eksternal, serta pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, strategi pengembangan kelembagaan ke depan perlu diarahkan untuk memberikan perhatian lebih besar pada komponen-komponen dalam Kuadran I, mempertahankan capaian yang sudah baik di Kuadran II, serta tetap melakukan pemantauan terhadap Kuadran III dan IV agar kelembagaan dapat berkembang menuju tahap pematangan bahkan dewasa sesuai kerangka IDF.

Perumusan Strategi Pengelolaan Kelembagaan

Rangkuti (2015) Analisis SWOT merupakan cara untuk mengidentifikasi faktor yang sistematis guna merumuskan strategi. Analisis SWOT membandingkan faktor antara eksternal (*Opportunity*) dan ancaman (*threats*) faktor internal kekuatan (*Strenght*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Dan untuk bisa menentukan strategi pengelolaan kelembagaan di Bukit Kondo Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Lombok Timur dan dilakukan analisis SWOT (*Opportunity, threats, strength, dan Weaknesses*).

1. Evaluasi Faktor Strategi Internal

Pada strategi internal ada 2 indikator strategi ialah kelemahan dan kekuatan. Faktor internal yaitu faktor menunjukkan kondisi internal kelembagaan ekowisata yang secara langsung dapat memengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan pengelolaan.

Analisis Kekuatan

Adapun faktor-faktor kekuatan ekowisata Bukit Kondo secara rinci disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perhitungan Analisis Kekuatan

No	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Bobot	Rating	Skor
1	Struktur organisasi telah terbentuk dan berfungsi aktif	0,15	4	0,60
2	Partisipasi masyarakat lokal tinggi dalam kegiatan kelembagaan	0,10	3	0,30
3	Adanya visi dan misi kelembagaan yang dipahami anggota	0,10	3	0,30
4	Dukungan dari pemerintah desa dan TNGR terhadap kegiatan kelompok	0,10	3	0,30
5	Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan tinggi	0,10	3	0,30
Total		0,55		1,80

Hasil analisis menunjukkan total skor kekuatan sebesar 1,80, menandakan bahwa Pokdarwis Rinjani Perkasa memiliki fondasi internal yang cukup solid. Struktur kelembagaan yang jelas, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan pemerintah menjadi aset penting bagi keberlanjutan organisasi. Keberadaan visi dan misi yang dipahami anggota memperkuat arah kerja kelompok, sementara semangat

gotong royong berperan dalam menjaga solidaritas internal. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa secara sosial, kelembagaan telah tumbuh sebagai wadah kolektif masyarakat yang berfungsi cukup efektif. Seperti dalam Anwar *et al.*, (2023), yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif komunitas berperan langsung dalam memperkuat ekonomi lokal sekaligus menutup celah kelemahan institusional. Dengan demikian, strategi pengembangan Bukit Kondo perlu memanfaatkan kekuatan dominan berupa daya tarik alam dan partisipasi masyarakat sebagai pintu masuk untuk memperkuat kelembagaan formal dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah maupun TNGR.

Analisis Kelemahan

Adapun faktor-faktor kelemahan ekowisata Bukit Kondo secara rinci disajikan dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perhitungan Analisis Kelemahan

No	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Bobot	Rating	Skor
1	Tidak ada sistem evaluasi dan rencana kerja tahunan yang terjadwal	0,10	2	0,20
2	Manajemen keuangan belum transparan dan belum terdokumentasi	0,10	1	0,10
3	Hubungan kemitraan dengan instansi eksternal belum berkelanjutan	0,10	2	0,20
4	Kapasitas pengurus dalam administrasi dan manajemen kelembagaan masih rendah	0,10	2	0,20
5	Regenerasi kepengurusan belum berjalan optimal	0,05	1	0,05
Total		0,45		0,75

Nilai total kelemahan sebesar 0,75 memperlihatkan bahwa kelembagaan Pokdarwis masih menghadapi persoalan struktural dalam tata kelola internal. Kurangnya sistem perencanaan, transparansi keuangan, dan regenerasi kepengurusan menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun semangat anggota tinggi, kelembagaan belum memiliki mekanisme administratif yang mampu menjamin keberlanjutan jangka panjang. Diperlukan pembinaan intensif dalam manajemen organisasi agar kelembagaan dapat berkembang secara profesional dan akuntabel.

2. Analisis Faktor Strategi Eksternal

Faktor eksternal dalam analisis SWOT berkaitan dengan kondisi di luar kelembagaan yang dapat memengaruhi keberlangsungan dan arah pengembangan ekowisata. Pada kasus Bukit Kondo, faktor eksternal terdiri atas peluang dan ancaman.

Analisis Peluang

Adapun faktor-faktor peluang ekowisata Bukit Kondo secara rinci disajikan dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perhitungan Analisis Peluang

No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Bobot	Rating	Skor
1	Dukungan kebijakan pemerintah terhadap penguatan kelembagaan Pokdarwis	0,15	4	0,60

2	Potensi kerja sama dengan universitas, TNGR, dan LSM	0,10	3	0,30
3	Tren pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat meningkat	0,10	3	0,30
4	Dukungan sosial masyarakat lokal terhadap kegiatan Pokdarwis	0,10	3	0,30
Total		0,45		1,50

Hasil analisis menunjukkan total skor peluang sebesar 1,50, yang menandakan lingkungan eksternal cukup mendukung penguatan kelembagaan. Adanya kebijakan pemerintah tentang penguatan Pokdarwis serta meningkatnya tren partisipasi masyarakat menjadi momentum strategis bagi kelompok untuk memperluas jejaring kemitraan. Dukungan masyarakat sekitar juga menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan lembaga.(Pratama *et al.*, 2023), yang menemukan bahwa regulasi pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan ekowisata komunitas.

Analisis Ancaman

Adapun faktor-faktor ancaman ekowisata Bukit Kondo secara rinci disajikan dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Perhitungan Analisis Ancaman

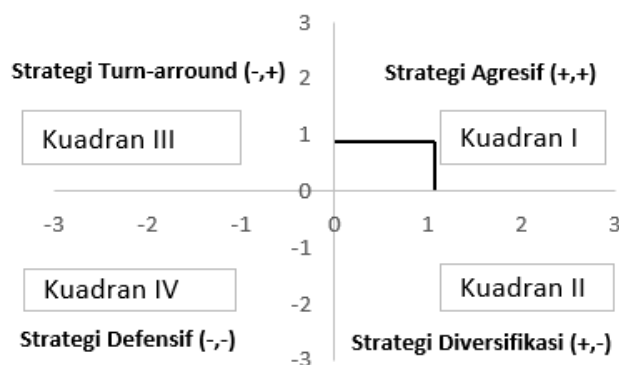
No	Ancaman (<i>Threats</i>)	Bobot	Rating	Skor
1	Ketergantungan kelembagaan pada jumlah kunjungan wisatawan	0,10	2	0,20
2	Tidak konsistennya pembinaan dari pihak eksternal	0,10	2	0,20
3	Potensi konflik internal akibat kurangnya transparansi keuangan	0,10	2	0,20
4	Koordinasi antar lembaga pendukung belum optimal	0,10	1	0,10
Total		0,40		0,70

Nilai total ancaman sebesar 0,70 menunjukkan bahwa kelembagaan Pokdarwis Rinjani Perkasa masih menghadapi risiko dari faktor eksternal, terutama ketergantungan pada jumlah wisatawan dan kurangnya pembinaan berkelanjutan. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat memengaruhi stabilitas organisasi. Oleh karena itu, Pokdarwis perlu memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai pihak agar tidak bergantung pada kondisi pariwisata semata dan mampu menjaga kesinambungan kelembagaan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa konflik lahan dan keterbatasan pengelolaan sering menjadi faktor penghambat keberhasilan ekowisata komunitas.

Rumusan Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan didapatkan nilai X 1,03 dan nilai Y Adalah 0,95. Berdasarkan hasil dari analisis perkembangan kelembagaan yang ada di bukit kondo didapatkan hasil berada pada kuadran I. Menurut (Cahyono & Kusnanik, 2023) Kuadran I dapat menguntungkan dengan adanya peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi pada kuadran ini yaitu dengan mendukung kebijakan perkembangan yang agresif. Dengan demikian, strategi pengembangan diarahkan untuk memanfaatkan peluang secara maksimal

dengan bertumpu pada kekuatan yang ada. Gambar kuadran SWOT kelembagaan ekowisata bukit kondo sebagai berikut.



Gambar 2. Grafik Kuadran SWOT

Kedudukan kelembagaan Pokdarwis Rinjani Perkasa pada Kuadran I menunjukkan bahwa lembaga ini berpeluang besar untuk berkembang secara cepat apabila mampu mengoptimalkan kekuatan yang ada. Faktor seperti struktur organisasi yang aktif, dukungan masyarakat lokal, dan semangat gotong royong dapat digunakan untuk menjawab peluang seperti adanya pembinaan dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga eksternal, serta meningkatnya dukungan kebijakan terhadap penguatan kelembagaan desa wisata. Oleh karena itu, strategi pengembangan diarahkan pada penerapan strategi S-O (Strengths-Opportunities) yang bersifat proaktif dalam memperkuat kelembagaan secara menyeluruh.

Dengan matriks SWOT dapat digambarkan dengan jelas strategi internal dan eksternal yang sedang dihadapi sebuah organisasi. Hasil perumusan strategi sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Perumusan Strategi

Faktor internal		
Faktor eksternal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi Pokdarwis sudah terbentuk 2. Partisipasi Masyarakat local tinggi. 3. Dukungan pemerintah desa dan TNGR terhadap kegiatan kelembagaan. 4. Visi dan misi kelembagaan telah disepakati bersama. 5. Nilai sosial gotong royong dan kepedulian lingkungan kuat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada sistem evaluasi dan perencanaan program rutin. 2. Transparansi keuangan belum optimal. 3. Kapasitas manajemen dan administrasi masih rendah. 4. Regenerasi kepengurusan belum berjalan.
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Sreategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap penguatan kelembagaan Pokdarwis. 2. Peluang kerja sama dengan universitas, LSM, dan TNGR. 3. Meningkatnya tren pemberdayaan masyarakat desa wisata. 4. Dukungan sosial masyarakat terhadap kegiatan kelembagaan. 5. Potensi kemitraan lintas sektor dalam pendampingan kelembagaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat posisi kelembagaan melalui pelatihan dan pembinaan rutin. 2. Mengoptimalkan struktur organisasi dan partisipasi masyarakat untuk memperluas jejaring kemitraan. 3. Menjalin kerja sama strategis dengan lembaga eksternal guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengelolaan administrasi. 4. Mengembangkan program kelembagaan berbasis pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kemitraan dengan universitas dan LSM untuk memperbaiki kelemahan administrasi dan sistem keuangan. 2. Menggunakan peluang pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam perencanaan dan evaluasi program. 3. Mendorong pemerintah daerah memberikan asistensi teknis guna memperbaiki tata kelola internal.

masyarakat dengan dukungan mitra akademik.		
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Ketergantungan kelembagaan pada fluktuasi kunjungan wisatawan.	1. Memanfaatkan kekompakan dan semangat gotong royong anggota untuk menjaga stabilitas kelembagaan saat dukungan eksternal berkurang.	1. Meningkatkan profesionalisme kelembagaan melalui pelatihan akuntabilitas dan pelaporan keuangan agar risiko konflik dapat ditekan.
2. Kurangnya pembinaan dan monitoring eksternal secara konsisten.	2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, TNGR, dan dinas pariwisata agar dukungan lebih berkesinambungan.	2. Membenahi sistem administrasi dan regenerasi agar kelembagaan lebih siap menghadapi perubahan eksternal.
3. Potensi konflik internal akibat transparansi keuangan rendah.	3. Membentuk sistem pelaporan internal secara berkala untuk menjaga transparansi dan kepercayaan antar anggota.	3. Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar dengan mengembangkan potensi internal seperti iuran anggota dan kegiatan mandiri kelembagaan.
4. Koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal.	4. Menyusun pedoman kelembagaan (AD/ART) agar fungsi organisasi tetap berjalan stabil dalam kondisi perubahan kebijakan.	
5. Ketidakpastian kebijakan dalam program penguatan kelembagaan pariwisata.		

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis *Institutional Development Framework* (IDF), tingkat perkembangan kelembagaan ekowisata berbasis masyarakat di Bukit Kondo berada pada kategori berkembang dengan indeks nilai 1,6.
2. Hambatan utama terdapat pada koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan infrastruktur.

3. Strategi prioritas diarahkan pada peningkatan penguatan kapasitas internal melalui peningkatan kemampuan manajerial dan administratif, pengembangan sumber daya manusia lokal, serta optimalisasi dukungan masyarakat dan pemerintah desa.

REKOMENDASI

Dari sisi teoretis, penelitian ini memberikan perluasan terhadap penerapan pendekatan *Institutional Development Framework (IDF)* dalam pengelolaan ekowisata non-pendakian berbasis masyarakat. Sementara itu, secara praktis, hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah dan kelompok sadar wisata dalam memperkuat kelembagaan ekowisata yang tangguh, kompetitif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Selaras dengan hasil temuan tersebut, pemerintah diharapkan meningkatkan dukungan terhadap pengembangan ekowisata Bukit Kondo melalui kebijakan yang berpihak, penyediaan sarana-prasarana, promosi berbasis digital, serta pendampingan teknis agar kelembagaan mampu berkembang secara profesional dan berkesinambungan. Partisipasi aktif masyarakat juga penting ditingkatkan melalui pengembangan usaha wisata dan kegiatan pelestarian lingkungan, sehingga dapat memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal. Selain itu, bagi penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan analisis mengenai preferensi wisatawan, daya dukung lingkungan, serta perbandingan dengan destinasi serupa agar strategi penguatan kelembagaan menjadi lebih menyeluruh dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

REFERENSI

- Anggriani, R., Febriana, W., Prasetyo, R., & Komala, R. (2023). Ekowisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 4(3), 137–151. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v4i3.430>
- Anwar, R. K., Rahman, M. T., & Winoto, Y. (2023). Community Role in Ecotourism Development to Improve Local Economy. *Khazanah Sosial*, 5(2), 387–402. <https://doi.org/10.15575/ks.v5i2.24873>
- Anwar, R. K., Saepudin, E., & Rukmana, E. N. (2024). Eco-tourism and economic striving of the locals: From participation to empowerment. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(2), 1–17. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i2.3038>
- Azmi, M., Arifin, Y. F., & Husaini, M. (2025). Community-Driven Institutional Strategies for Ecotourism Development: A Case of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in South Kalimantan, Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 12(6), 175–183. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250622>
- Cahyono, A. J., & Kusnanik, N. W. (2023). Analisis swot pembinaan prestasi cabang olahraga woodball di kabupaten sidoarjo. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 6(3), 112–120.
- Dwi, M., & Maskuri, M. (2023). Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Islam Multikultural Melalui Spirit Entrepreneur Santri (Studi Etnografi di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang). *Edunity : Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 246–266. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.55>
- Hanggraito, A. A., & Sanjiwani, N. M. G. (2020). Tren Segmentasi Pasar dan Perilaku Wisatawan Taman Bunga Amaryllis di Era 4.0. *Journal of Tourism and Creativity*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.19184/jtc.v4i1.14476>
- Jaelani, M., Anwar, H., Wahyuningsih, D. E., Program, S., Kehutanan, J., Kehutanan,

- F., Pertanian, U., Mataram, J., Majapahit, N., 62, N., & Tenggara Barat, I. (2023). Pengelolaan Ekowisata Air Terjun Segenter Berbasis Masyarakat (Community Based Ecotourism) Di Dusun Kumbi Desa Pakuan Lombok Barat Community-Based Management of Segenter Waterfall Ecotourism in Kumbi, Pakuan Village, West Lombok. *Jurnal Rimba Lestari*, 03(01), 14–27. <https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v3i1.3053>
- Kampung, D. I., Rejowinangun, W., Tisnawati, E., Ayu, D., Natalia, R., Ratriningsih, D., & Putro, A. R. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN EKO-WISATA BERBASIS MASYARAKAT Kota Yogyakarta yang merupakan salah mempunyai potensi wisata yang daya tarik wisata yang saat ini adalah Desa wisata didefinisikan sebagai desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata kehi. XV(1), 1–11.
- Lelloltery, H., Hitipeuw, J. C., & Sahureka, M. (2020). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Hutan Lindung Gunung Sirimau Kota Ambon. *Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.20527/jht.v8i1.8155>
- Moh Habibi Azhari, O., Fahlevi Royanow, A., & Pariwisata Lombok, P. (2024). Motivasi Dan Kendala Wisatawan Wisata Minat Khusus Trekking Di Gunung Rinjani. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(12), 2359–2366. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/7773>
- Nasional, T., Merapi, G., Alam, L. P., Kehutanan, F., & Mada, U. G. (2015). 1, 2 3. 165–176.
- Nazwin, A. H., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Ekowisata: A Systematic Literature Review. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 304–315. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9252>
- Noviati Sadikin, P., Mulatsih, S., Susilo Arifin, H., & Pramudya Noorachmat, B. (2020). Analysis of Sustainability Status of Ecotourism in Mount Rinjani National Park. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 17(1), 33–51. <https://doi.org/10.20886/jakk.2020.17.1.33-51>
- Paulus Nong Wisang, & Maria Monika. (2025). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Egon Buluk Kabupaten Sikka. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(2), 278–296. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v21i2.695>
- Pratama, D. H., Wibowo, G. D., & Purnomo, C. E. (2023). Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Provinsi NTB). *Indonesia Berdaya*, 4(3), 931–942. <https://doi.org/10.47679/ib.2023507>
- Purwendah, E. K., Rusito, & Periani, A. (2022). Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 121–134. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1609>
- Putri, B. J. Y., Ichsan, A. C., & Lestari, A. T. (2023). Community-Based Ecotourism Management Strategy in Bukit Pergasingan, Sembalun Village, East Lombok. *Perennial*, 19(2), 8–16. <http://dx.doi.org/10.24259/perennial.v19i2.30804>
- Rojana, A. R. F., & Muhsoni, F. F. (2021). Analisis Keberlanjutan Ekowisata Bahari Kategori Pantai Pantai Gua Manik dan Benteng Portugis di Kabupaten Jepara. *Rekayasa: Journal of Science and Technology*, 14(1), 138–143. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa/article/view/10798>
- Susanto, A., Widodo, W., Handayani, T., & Rahayu, I. D. (2022). Penguatan

Kelembagaan Ekonomi Berbasis Agribisnis Jamu Ternak. *Prosiding SENACENTER (Seminar Nasional Cendekia Peternakan)*, 1(1), 6–9.
<https://doi.org/10.32503/senacenter.v1i1.3>